



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2001
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2002**

- Menimbang:** a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah melakukan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002;
- b. bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat:** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nomor 4165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROPINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2002.

BAB I PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2002 ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 setelah dikurangi dengan Penerimaan Negara yang dibagihasikan kepada Daerah.
- (3) Besaran Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Daerah Provinsi sebagai 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
 - b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

BAB II PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

- (1) Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penghitungan Dana Alokasi Umum suatu Daerah juga mempertimbangkan Faktor Penyeimbang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam Pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggungjawab Daerah.
- (3) Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas Alokasi Minimum kepada Daerah yang diperhitungkan dalam bentuk lumpsum dan berdasarkan proporsi beban belanja pegawai Tahun Anggaran 2001.

Pasal 3

- (1) Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
- (2) Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Gubernur melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 159

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 131 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

**RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2002**

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
1	2	3
1.	PROVINSI NANGROE ACEH DARUSALAM	150.56
1.1.	Kab. Aceh Barat	174.77
1.2.	Kab. Aceh Besar	167.02
1.3.	Kab. Aceh Selatan	137.35
1.4.	Kab. Aceh Singkil	99.82
1.5.	Kab. Aceh Tengah	146.11
1.6.	Kab. Aceh Tenggara	130.55
1.7.	Kab. Aceh Timur	180.10
1.8.	Kab. Aceh Utara	199.90
1.9.	Kab. Bireuen	138.87
1.10	Kab. Pidie	233.02
1.11	Kab. Simeuleu	87.27
1.12	Kota Banda Aceh	137.95
1.13	Kota Sabang	79.87
1.14	Kota Langsa	57.48
1.15	Kota Lhokseumawe	62.72
Jumlah se Provinsi Nangroe Aceh Darussalam		2,183.36
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	260.61
2.1.	Kab. Asahan	233.55
2.2.	Kab. Dairi	132.13
2.3.	Kab. Deli Serdang	395.28
2.4.	Kab. Tanah Karo	142.47
2.5.	Kab. Labuhan Batu	218.44
2.6.	Kab. Langkat	238.84
2.7.	Kab. Mandailing Natal	140.42
2.8.	Kab. Nias	205.77
2.9.	Kab. Simalungun	276.26
2.10.	Kab. Tapanuli Selatan	246.17
2.11.	Kab. Tapanuli Tengah	122.53
2.12.	Kab. Tapanuli Utara	207.84
2.13.	Kab. Toba Samosir	141.91
2.14.	Kota Binjai	128.83
2.15.	Kota Medan	341.03

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
1	2	3
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	
2.16.	Kota Pematang Siantar	125.38
2.17.	Kota Sibolga	82.51
2.18.	Kota Tanjung Balai	99.96
2.19.	Kota Tebing Tinggi	105.76
2.20.	Kota Padang Sidempuan	70.30
Jumlah se Provinsi Sumatera Utara		3,915.99
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	193.52
3.1.	Kab. 50 Kota	135.42
3.2.	Kab. Agam	168.29
3.3.	Kab. Kepulauan Mentawai	95.02
3.4.	Kab. Padang Pariaman	171.75
3.5.	Kab. Pasaman	175.63
3.6.	Kab. Pesisir Selatan	155.93
3.7.	Kab. Sawahlunto Sijunjung	140.40
3.8.	Kab. Solok	169.17
3.9.	Kab. Tanah Datar	148.77
3.10.	Kota Bukit Tinggi	85.74
3.11.	Kota Padang Panjang	64.55
3.12.	Kota Padang	233.83
3.13.	Kota Payakumbuh	103.27
3.14.	Kota Sawahlunto	70.34
3.15.	Kota Solok	68.95
Jumlah se Provinsi Sumatera Barat		2,180.58
4.	PROVINSI RIAU	110.71
4.1.	Kab. Bengkalis	206.72
4.2.	Kab. Indragiri Hilir	203.82
4.3.	Kab. Indragiri Hulu	162.26
4.4.	Kab. Kampar	185.11
4.5.	Kab. Karimun	117.65
4.6.	Kab. Riau Kepulauan	95.51
4.7.	Kab. Kuantan Singingi	118.23
4.8.	Kab. Natuna	147.58
4.9.	Kab. Pelalawan	109.95
4.10.	Kab. Rokan Hilir	91.85
4.11.	Kab. Rokan Hulu	104.15
4.12.	Kab. Siak	95.61
4.13.	Kota Batam	104.20
4.14.	Kota Dumai	93.48

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
1	2	3
4.	PROVINSI RIAU	
4.15.	Kota Pekanbaru	143.01
4.16.	Kota Tanjung Pinang	53.16
Jumlah se Provinsi Riau		2,143.00
5.	PROVINSI JAMBI	181.92
5.1.	Kab. Batanghari	120.67
5.2.	Kab. Bungo	134.88
5.3.	Kab. Kerinci	163.10
5.4.	Kab. Merangin	131.35
5.5.	Kab. Muaro Jambi	100.18
5.6.	Kab. Sarolangun	112.11
5.7.	Kab. Tanjung Jabung Barat	104.58
5.8.	Kab. Tanjung Jabung Timur	97.44
5.9.	Kab. Tebo	99.93
5.10.	Kota Jambi	149.50
Jumlah se Provinsi Jambi		1,395.66
6.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	211.53
6.1.	Kab. Lahat	143.72
6.2.	Kab. Musi Banyuasin	249.92
6.3.	Kab. Musi Rawas	135.24
6.4.	Kab. Muara Enim	158.43
6.5.	Kab. Ogan Komering Ilir	247.74
6.6.	Kab. Ogan Komering Ulu	260.20
6.7.	Kota Palembang	288.21
6.8.	Kota Pagar Alam	59.92
6.9.	Kota Lubuk Linggau	78.86
6.10.	Kota Prabumulih	44.48
Jumlah se Provinsi Sumatera Selatan		1,878.25
7.	PROVINSI BENGKULU	162.55
7.1.	Kab. Bengkulu Selatan	178.00
7.2.	Kab. Bengkulu Utara	166.72
7.3.	Kab. Rejang Lebong	169.91
7.4.	Kota Bengkulu	129.37
Jumlah se Provinsi Bengkulu		806.55
8.	PROVINSI LAMPUNG	211.11
8.1.	Kab. Lampung Barat	133.52
8.2.	Kab. Lampung Selatan	256.15

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
8.	PROVINSI LAMPUNG	
8.3.	Kab. Lampung Tengah	272.87
8.4.	Kab. Lampung Utara	200.31
8.5.	Kab. Lampung Timur	209.73
8.6.	Kab. Tanggamus	204.60
8.7.	Kab. Tulang Bawang	160.83
8.8.	Kab. Way Kanan	120.11
8.9.	Kota Bandar Lampung	199.35
8.10.	Kota Metro	111.46
Jumlah se Provinsi Lampung		2,080.04
9.	PROVINSI DKI JAKARTA	535.70
10.	PROVINSI JAWA BARAT	393.88
10.1.	Kab. Bandung	654.79
10.2.	Kab. Bekasi	230.88
10.3.	Kab. Bogor	479.57
10.4.	Kab. Ciamis	361.76
10.5.	Kab. Cianjur	330.82
10.6.	Kab. Cirebon	324.51
10.7.	Kab. Garut	401.24
10.8.	Kab. Indramayu	275.51
10.9.	Kab. Karawang	265.41
10.10.	Kab. Kuningan	237.60
10.11.	Kab. Majalengka	245.94
10.12.	Kab. Purwakarta	163.18
10.13.	Kab. Subang	254.40
10.14.	Kab. Sukabumi	324.84
10.15.	Kab. Sumedang	250.27
10.16.	Kab. Tasikmalaya	338.88
10.17.	Kota Bandung	385.17
10.18.	Kota Bekasi	209.44
10.19.	Kota Bogor	165.87
10.20.	Kab Cirebon	123.46
10.21.	Kota Depok	160.11
10.22.	Kota Sukabumi	109.81
10.23.	Kota Cimahi	96.36
10.24.	Kota Tasikmalaya	129.09
Jumlah se Provinsi Jawa Barat		6,912.79
11.	PROVINSI JAWA TENGAH	560.63
11.1.	Kab. Banjarnegara	213.55
11.2.	Kab. Banyumas	316.65

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
11.	PROVINSI JAWA TENGAH	
11.3.	Kab. Batang	211.88
11.4.	Kab. Blora	285.25
11.5.	Kab. Boyolali	249.26
11.6.	Kab. Brebes	302.52
11.7.	Kab. Cilacap	326.11
11.8.	Kab. Demak	196.74
11.9.	Kab. Grobogan	263.51
11.10.	Kab. Jepara	231.36
11.11.	Kab. Karanganyar	219.44
11.12.	Kab. Kebumen	283.64
11.13.	Kab. Kendal	286.81
11.14.	Kab. Klaten	323.99
11.15.	Kab. Kudus	184.43
11.16.	Kab. Magelang	267.01
11.17.	Kab. Pati	266.50
11.18.	Kab. Pekalongan	205.22
11.19.	Kab. Pemasang	248.89
11.20.	Kab. Purbalingga	232.35
11.21.	Kab. Purworejo	225.78
11.22.	Kab. Rembang	170.70
11.23.	Kab. Semarang	215.29
11.24.	Kab. Sragen	238.90
11.25.	Kab. Sukoharjo	205.28
11.26.	Kab. Tegal	280.22
11.27.	Kab. Temanggung	196.61
11.28.	Kab. Wonogiri	250.13
11.29.	Kab. Wonosobo	213.52
11.30.	Kota Magelang	105.59
11.31.	Kota Pekalongan	99.27
11.32.	Kota Salatiga	97.41
11.33.	Kota Semarang	266.95
11.34.	Kota Surakarta	173.82
11.35.	Kota Tegal	178.27
Jumlah se Provinsi Jawa Tengah		8,593.48
12.	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	214.48
12.1.	Kab. Bantul	258.68
12.2.	Kab. Gunung Kidul	209.50
12.3.	Kab. Kulon Progo	207.90
12.4.	Kab. Sleman	255.35
12.5.	Kota Yogyakarta	162.54
Jumlah se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		1.308.45

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
13.	PROVINSI JAWA TIMUR	453.21
13.1.	Kab. Bangkalan	199.54
13.2.	Kab. Banyuwangi	317.28
13.3.	Kab. Blitar	282.91
13.4.	Kab. Bojonegoro	257.29
13.5.	Kab. Bondowoso	251.72
13.6.	Kab. Gresik	199.74
13.7.	Kab. Jember	423.65
13.8.	Kab. Jombang	254.36
13.9.	Kab. Kediri	307.74
13.10.	Kab. Lamongan	262.71
13.11.	Kab. Lumajang	235.42
13.12.	Kab. Madiun	208.50
13.13.	Kab. Magetan	220.60
13.14.	Kab. Malang	439.17
13.15.	Kab. Mojokerto	257.22
13.16.	Kab. Nganjuk	253.28
13.17.	Kab. Ngawi	229.32
13.18.	Kab. Pacitan	197.36
13.19.	Kab. Pamekasan	202.95
13.20.	Kab. Pasuruan	378.25
13.21.	Kab. Ponorogo	243.00
13.22.	Kab. Probolinggo	242.60
13.23.	Kab. Sampang	179.00
13.24.	Kab. Sidoarjo	272.19
13.25.	Kab. Situbondo	206.73
13.26.	Kab. Sumenep	363.41
13.27.	Kab. Trenggalek	223.89
13.28.	Kab. Tuban	234.28
13.29.	Kab. Tulungagung	262.77
13.30.	Kota Blitar	96.91
13.31.	Kota Kediri	112.60
13.32.	Kota Madiun	207.32
13.33.	Kota Malang	183.42
13.34.	Kota Mojokerto	103.57
13.35.	Kota Pasuruan	125.07
13.36.	Kota Probolinggo	96.53
13.37.	Kota Surabaya	332.08
13.38.	Kota Batu	28.81
Jumlah se Provinsi Jawa Timur		9,346.40
14.	PROPINSI KALIMANTAN BARAT	228.28
14.1.	Kab. Bengkayang	97.58
14.2.	Kab. Landak	120.72

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
14.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
14.3.	Kab. Kapuas Hulu	154.43
14.4.	Kab. Ketapang	200.77
14.5.	Kab. Pontianak	197.27
14.6.	Kab. Sambas	192.54
14.7.	Kab. Sanggau	204.65
14.8.	Kab. Sintang	194.54
14.9.	Kota Pontianak	176.00
14.10.	Kota Singkawang	59.56
Jumlah se Provinsi Kalimantan Barat		1,826.32
15.	PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	204.84
15.1.	Kab. Barito Selatan	131.77
15.2.	Kab. Barito Utara	152.57
15.3.	Kab. Kapuas	263.55
15.4.	Kab. Kota Waringin Barat	141.74
15.5.	Kab. Kota Waringin Timur	243.03
15.6.	Kota Palangkaraya	119.18
Jumlah se Provinsi Kalimantan Tengah		1,256.68
16.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	161.80
16.1.	Kab. Banjar	141.42
16.2.	Kab. Barito Kuala	111.47
16.3.	Kab. Hulu Sungai Selatan	119.57
16.4.	Kab. Hulu Sungai Tengah	125.35
16.5.	Kab. Hulu Sungai Utara	119.57
16.6.	Kab. Kota Baru	130.91
16.7.	Kab. Tabalong	98.61
16.8.	Kab. Tanah Laut	99.02
16.9.	Kab. Tapin	103.86
16.10.	Kota Banjar Baru	84.78
16.11.	Kota Banjarmasin	162.61
Jumlah se Provinsi Kalimantan Selatan		1,459.29
17.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	96.96
17.1.	Kab. Berau	123.95
17.2.	Kab. Bulungan	170.18
17.3.	Kab. Kutai	297.81
17.4.	Kab. Kutai Barat	116.62
17.5.	Kab. Kutai Timur	103.06

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
17.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
17.6.	Kab. Malinau	78.16
17.7.	Kab. Nunukan	81.63
17.8.	Kab. Paser	148.55
17.9.	Kota Balikpapan	135.09
17.10.	Kota Bontang	75.72
17.11.	Kota Samarinda	194.48
17.12.	Kota Tarakan	72.99
Jumlah se Provinsi Kalimantan Timur		1,695.20
18.	PROVINSI SULAWESI UTARA	233.47
18.1.	Kab. Bolaang Mongondow	174.90
18.2.	Kab. Minahasa	311.61
18.3.	Kab. Sangihe Talaud	152.30
18.4.	Kota Bitung	105.30
18.5.	Kota Manado	141.81
Jumlah se Provinsi Sulawesi Utara		1,119.39
19.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	190.51
19.1.	Kab. Banggai	150.17
19.2.	Kab. Banggai Kepulauan	89.83
19.3.	Kab. Buol	81.21
19.4.	Kab. Toli-Toli	112.27
19.5.	Kab. Donggala	260.86
19.6.	Kab. Morowali	119.82
19.7.	Kab. Poso	200.62
19.8.	Kota Palu	133.20
Jumlah se Provinsi Sulawesi Tengah		1,338.49
20.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	257.41
20.1.	Kab. Bantaeng	89.18
20.2.	Kab. Barru	105.47
20.3.	Kab. Bone	209.15
20.4.	Kab. Bulukumba	146.06
20.5.	Kab. Enrekang	101.97
20.6.	Kab. Gowa	173.91
20.7.	Kab. Jeneponto	129.02
20.8.	Kab. Luwu	171.29
20.9.	Kab. Luwu Utara	139.79
20.10.	Kab. Majene	97.89
20.11.	Kab. Mamuju	157.52
20.12.	Kab. Maros	127.05

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
20.13.	Kab. Pangkep	125.62
20.14.	Kab. Pinrang	133.72
20.15.	Kab. Polewali Mamasa	158.63
20.16.	Kab. Selayar	89.79
20.17.	Kab. Sidrap	117.54
20.18.	Kab. Sinjai	112.85
20.19.	Kab. Soppeng	125.85
20.20.	Kab. Takalar	119.10
20.21.	Kab. Tana Toraja	168.54
20.22.	Kab. Wajo	139.92
20.23.	Kota Pare-pare	89.93
20.24.	Kota Makasar	274.48
Jumlah se Provinsi Sulawesi Selatan		3,561.68
21.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	179.37
21.1.	Kab. Buton	188.54
21.2.	Kab. Kendari	225.32
21.3.	Kab. Kolaka	159.35
21.4.	Kab. Muna	170.31
21.5.	Kota Kendari	111.58
21.6.	Kota Bau-Bau	63.59
Jumlah se Provinsi Sulawesi Tenggara		1,098.06
22.	PROVINSI BALI	168.16
22.1.	Kab. Badung	146.57
22.2.	Kab. Bangli	98.61
22.3.	Kab. Buleleng	200.90
22.4.	Kab. Gianyar	189.54
22.5.	Kab. Jembrana	125.50
22.6.	Kab. Karangasem	142.75
22.7.	Kab. Klungkung	105.44
22.8.	Kab. Tabanan	193.88
22.9.	Kota Denpasar	166.77
Jumlah se Provinsi Bali		1,538.12
23.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	193.80
23.1.	Kab. Bima	207.74
23.2.	Kab. Dompu	116.15
23.3.	Kab. Lombok Barat	197.28
23.4.	Kab. Lombok Tengah	221.34
23.5.	Kab. Lombok Timur	246.39
23.6.	Kab. Sumbawa	165.15

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
23.7.	Kota Mataram	116.81
Jumlah se Provinsi Nusa Tenggara Barat		1,464.66
24.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	244.03
24.1.	Kab. Alor	123.52
24.2.	Kab. Belu	167.60
24.3.	Kab. Ende	136.21
24.4.	Kab. Flores Timur	134.17
24.5.	Kab. Kupang	236.37
24.6.	Kab. Lembata	97.21
24.7.	Kab. Manggarai	206.84
24.8.	Kab. Ngada	141.16
24.9.	Kab. Sikka	133.33
24.10.	Kab. Sumba Barat	144.21
24.11.	Kab. Sumba Timur	128.34
24.12.	Kab. Timor Tengah Selatan	193.26
24.13.	Kab. Timor Tengah Utara	145.98
24.14.	Kota Kupang	117.71
Jumlah se Provinsi Nusa Tenggara Timur		2,349.94
25.	PROVINSI MALUKU	191.71
25.1.	Kab. Maluku Tenggara Barat	127.56
25.2.	Kab. Maluku Tengah	250.26
25.3.	Kab. Maluku Tenggara	153.48
25.4.	Kab. Pulau Buru	107.96
25.5.	Kota Ambon	142.08
Jumlah se Provinsi Maluku		973.05
26.	PROVINSI PAPUA	345.53
26.1.	Kab. Biak Nunfor	155.07
26.2.	Kab. Fak-Fak	169.11
26.3.	Kab. Jayapura	259.76
26.4.	Kab. Jayawijaya	299.45
26.5.	Kab. Manokwari	203.85
26.6.	Kab. Merauke	416.61
26.7.	Kab. Mimika	126.89
26.8.	Kab. Nabire	167.90
26.9.	Kab. Paniai	170.68
26.10.	Kab. Puncak Jaya	134.57
26.11.	Kab. Sorong	203.45
26.12.	Kab. Yapen Waropen	156.73

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2002 (miliar rupiah)
26.13.	Kab. Jayapura	141.28
26.14.	Kota Sorong	113.75
Jumlah se Provinsi Papua		3,064.63
27.	PROVINSI MALUKU UTARA	144.28
27.1.	Kab. Halmahera Tengah	163.28
27.2.	Kab. Maluku Utara	232.71
27.3.	Kota Ternate	122.22
Jumlah se Provinsi Maluku Utara		662.49
28.	PROVINSI BANTEN	155.59
28.1.	Kab. Lebak	205.52
28.2.	Kab. Pandeglang	235.52
28.3.	Kab. Serang	260.52
28.4.	Kab. Tangerang	306.60
28.5.	Kota Cilegon	84.26
28.6.	Kota Tangerang	158.11
Jumlah se Provinsi Banten		1,406.12
29.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	146.22
29.1.	Kab. Bangka	165.57
29.2.	Kab. Belitung	101.37
29.3.	Kab. Pangkal Pinang	81.31
Jumlah se Provinsi Bangka Belitung		494.47
30.	PROVINSI GORONTALO	129.04
30.1.	Kab. Boalemo	102.69
30.2.	Kab. Gorontalo	185.37
30.3.	Kota Gorontalo	108.18
Jumlah se Provinsi Gorontalo		525.28
JUMLAH SELURUH INDONESIA		69,114.12

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 ttd
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
 Lambock V. Nahattands